

## Pola Komunikasi Penyuluh Agama Islam Di Daerah 3T

**Bob Andrian**

Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung

boba@gmail.com

### ABSTRAK

Daerah Tertinggal, Terluar dan Terdepan (3T) adalah wilayah strategis negara yang mesti diperhatikan. Mengingat banyak sekali isu dan problematika yang terjadi di Daerah 3T, mulai dari krisis moral, akhlak, sampai pada krisis nasionalisme. Faktor utama penyebab problematika tersebut adalah dikarenakan oleh faktor geografis, sosiologi dan budaya yang berkembang di Daerah 3T. Kondisi tersebut tentu berdampak pada aspek pengembangan masyarakat, termasuk diantaranya kegiatan penyuluhan sosial keagamaan. Bertujuan untuk mengkaji secara mendalam dan mendeskripsikan Pola Komunikasi Penyuluh Agama Islam di Daerah 3T Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas sesuai dengan tugas dan fungsi pokok, yaitu fungsi *Informatif*, *Edukatif*, *Konsultatif* dan *Advokatif*. Adapun untuk menjawab kedua konsep tersebut teori yang digunakan adalah teori arah informasi dan teori atribusi (subjektivitas) dalam proses penyuluhan kepada masyarakat di Daerah 3T Kecamatan Sajingan Besar. Paradigma penelitian yang digunakan adalah *naturalistik* dengan pendekatan *fenomenologi*, jenis penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Hasil penelitian berdasarkan tujuan dan fokus masalah dapat disimpulkan bahwa Pola Komunikasi Penyuluh Agama Islam dalam melaksanakan fungsi pokok penyuluhan kepada masyarakat di Daerah 3T Kecamatan Sajingan Besar baik itu fungsi *informatif*, *edukatif*, *konsultatif* dan *advokatif*.

**Kata kunci :** 3T, Komunikasi, Sambas

### ABSTRACT

*Disadvantaged, Outermost and Frontier Regions (3T) are the country's strategic areas that must be considered. Given the many issues and problems that occur in the 3T Region, ranging from moral crises, morals, to the crisis of nationalism. The main factor causing these problems is due to geographical, sociological and cultural factors that develop in the 3T Region. This condition certainly has an impact on aspects of community development, including religious social counseling activities. Aims to study in depth and describe the Communication Patterns of Islamic Religious Instructors in the 3T Region of Sajingan Besar District, Sambas Regency in accordance with their main duties and functions, namely Informative, Educational, Consultative and Advocative functions. As for answering the two concepts, the theory used is the theory of information direction and the theory of attribution (subjectivity) in the counseling process to the community in the 3T Region of Sajingan Besar District. The research paradigm used is naturalistic with a phenomenological approach, a type of qualitative research with a case study method. The results of the study based on the objectives and focus of the problem can be concluded that the Communication Patterns of Islamic Religious Instructors in carrying out the main function of counseling to the community in the 3T Region of Sajingan Besar District are both informative, educative, consultative and advocative functions.*

**Keywords:** 3T, Communication, Sambas

### PENDAHULUAN

Indonesia di mata dunia merupakan negara yang kaya dan besar. Namun sangat disesalkan, ternyata kekayaan negara yang dimiliki oleh Indonesia masih belum berbanding lurus dengan pembangunan masyarakatnya (baik itu pembangunan infrastruktur maupun mental).(Noer Aly, 2007) Menurut data hasil

survey dari lembaga pengelola pendidikan sekitar 183 dari 514 Kabupaten dan Kota yang ada di Indonesia masih dikategorikan sebagai daerah tertinggal. Sekitar 12 Provinsi berada di daerah perbatasan. (Soekanto, 2007) Ketertinggalan yang terjadi di Indonesia tidak terbatas pada aspek ekonomi, tetapi juga bisa dilihat dari tingkat kesejahteraan sosial dan infrastruktur. Berbeda dengan negara tetangga Malaysia, Brunei dan Singapura, yang memiliki jumlah penduduk dan sumber daya alamnya yang relatif kecil dibanding Indonesia, tetapi memiliki tingkat kesejahteraan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia.

Masalah ketertinggalan yang terjadi di Indonesia tergolong cukup tinggi. Hampir di seluruh wilayah Indonesia memiliki pembangunan daerah yang terkesan belum merata. Terutama di wilayah-wilayah perbatasan yang tergolong Tertinggal, Terluar dan Terdepan (3T) atau disebut juga dengan wilayah atau daerah 3T. Berdasarkan isu-isu yang berkembang sekarang ini, Daerah 3T adalah wilayah yang strategis yang mesti diperhatikan. Masalah ketertinggalan yang terjadi di Indonesia tergolong tinggi, karena hampir di seluruh wilayah Indonesia memiliki pembangunan daerah yang terkesan belum merata. Terutama di wilayah-wilayah perbatasan yang tergolong Tertinggal, Terluar dan Terdepan (3T), sehingga disebut juga dengan wilayah atau daerah 3T. Berdasarkan isu-isu yang berkembang sekarang ini, Daerah 3T adalah wilayah yang mesti diperhatikan. Menurut Undang-undang No. 24 Tahun 1992 pada pasal 10 ayat 3, menjelaskan bahwa wilayah perbatasan merupakan salah satu wilayah yang strategis, yaitu secara Nasional menyangkut hak hidup khalayak, baik itu ditinjau dari sudut pandang politik, ekonomi, sosial, budaya, geografis lingkungan dan terlebih lagi dari sudut pandang pertahanan dan keamanan Negara.

Kalimantan Barat merupakan daerah perbatasan yang memiliki posisi strategis. Namun masih tergolong sebagai daerah tertinggal. Terutama di daerah-daerah terluar dan terdepan. Kalimantan Barat ditinjau dari geografisnya merupakan wilayah Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Sarawak Malaysia dan memiliki pintu masuk terbanyak dari beberapa daerah di Kalimantan. Menurut data administratif dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, Kalimantan Barat memiliki 5 Kabupaten dari 14 Kabupaten dan kota yang menurut data berbatasan langsung dengan negara tetangga Sarawak Malaysia satu di antaranya adalah Kabupaten Sambas.

Kabupaten Sambas merupakan daerah homogen yang memiliki masyarakat Muslim terbanyak dan memiliki suku Melayu terbesar di Kalimantan Barat. Secara geografis Kabupaten Sambas adalah daerah perbatasan terluar dan terdepan di Kalimantan Barat. Kecamatan Sajingan Besar dan Kecamatan Paloh merupakan daerah terluar dan terdepan yang menjadi teras perbatasan di Kabupaten Sambas. Berbeda dengan Kecamatan Paloh, Kecamatan Sajingan Besar merupakan pintu masuk utama perbatasan di Kabupaten Sambas, dengan luas wilayah 21,75% dari luas wilayah Kabupaten Sambas. Kecamatan Sajingan besar adalah garda terdepan

negara yang menempati posisi paling strategis, karena menjadi jalur regional internasional antara Serawak Malaysia dengan Indonesia, sehingga sangat perlu untuk diperhatikan oleh pemerintah.

Beberapa tahun terakhir di berbagai media, baik itu lokal atau nasional sering kali muncul kabar dan isu yang memberitakan bahwa kondisi sosial masyarakat di Daerah 3T justru kurang mendapat perhatian. Beberapa bukti di antaranya adalah infrastruktur yang tidak memadai, belum optimalnya pengembangan, dan kurangnya pemanfaatan potensi di daerah 3T. Ditambah dengan pernyataan dari Bupati Sambas H. Atbah Romin Suhaili dalam acara Musyawarah Kerja Daerah Asosiasi Badan Permusyawaratan Daerah seluruh Indonesia (ABPEDSI) Kabupaten Sambas, menyebutkan bahwa Sambas sekarang ini masuk kategori daerah yang paling tertinggal di seluruh Kabupaten di Kalimantan Barat, Kecamatan Sajingan Besar adalah salah satu di antaranya. Alasan Sajingan Besar merupakan daerah yang tergolong tertinggal, di antaranya adalah disebabkan oleh beberapa faktor.

*Pertama*, secara geografis Sajingan Besar adalah daerah yang letaknya berada di garda terdepan negara dan berbatasan langsung dengan negara Malaysia. Aktivitas sehari-hari masyarakatnya cenderung lebih intensif berkomunikasi dengan masyarakat negara tetangga. Aktivitas ini dibuktikan dari sisi ekonomi misalnya, masyarakat di Sajingan Besar dalam berbelanja lebih mengenal uang Ringgit. Bahkan pada umumnya masyarakat di Daerah 3T ini banyak yang bekerja di negara tersebut. Jaraknya yang begitu dekat, jalur transformasi yang relatif mudah dan cepat menjadi alasan utama, sehingga komunikasi lintas budaya dan negara yang berlangsung di daerah perbatasan juga sering terjadi. Menurut Pabali yang dikutip oleh Adnan dalam disertasinya menyebutkan, bahwa kegiatan dan interaksi lintas negara dan budaya secara intens ini tentu akan berdampak buruk terhadap rasa nasionalisme masyarakat terhadap negara mereka sendiri. (Adnan, 2015)

*Kedua*, sosial masyarakat di Daerah 3T Kecamatan Sajingan Besar adalah masyarakat yang *multikultural* (beragam), terdiri dari beragam etnis, suku, budaya dan agama. Secara umum masyarakatnya didominasi oleh agama Katolik, Kristen kemudian Islam dan Budhis. (Littlejohn, Stephen W., 2014) Adanya keberagaman tentunya menjadikan komunikasi lintas agamanya juga terbangun, sehingga sangat memungkinkan adanya pergesekan nilai dan bahkan konflik agama apabila tidak dijalin hubungan yang kondusif. Didukung dengan komunitas muslim yang relatif sedikit dibandingkan dengan umat Kristen dan Protestan di Daerah 3T sangat dimungkinkan akan adanya isu-isu kristenisasi oleh para misionaris-misionaris, sebagai mana yang terjadi di daerah-daerah Jawa barat misalnya.

*Ketiga*, Sajingan Besar letaknya jauh dari perkotaan (Kabupaten), dengan kondisi jalan yang rusak, sehingga aktivitas transportasi masyarakat juga terbatas. Ditambah dengan sulit dan jauhnya jangkauan jaringan komunikasi, menyebabkan sulit sekali masyarakat untuk menjalin komunikasi dengan pihak luar, terlebih lagi dengan pihak Pemerintah Daerah. Kondisi ini tentunya menjadi problematika bagi masyarakat, terutama dalam mendapatkan pelayanan publik. Maka tidak heran

masyarakatnya banyak yang merasa terisolir dan tidak diperhatikan oleh pemerintah.

Kondisi geografis dan sosial masyarakat di Daerah 3T Kecamatan Sajingan Besar tersebut tentu menjadi problematika tersendiri bagi bangsa Indonesia. Khususnya bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan dan upaya pembangunan daerah-daerah tertinggal dan terluar. Untuk mewujudkan pembangunan nasional seutuhnya, sebagaimana menurut prinsip dasar yang terdapat dalam undang-undang menyebutkan, bahwa maksud dan tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan pembangunan masyarakat Indonesia secara utuh dan merata dirasakan oleh masyarakat di seluruh tanah air. Pembangunan yang dimaksud adalah pembangunan secara keseluruhan baik di perkotaan maupun di pedesaan, terutama daerah tertinggal, terdepan dan terluar.

Mengingat kondisi Daerah 3T di Kecamatan Sajingan Besar yang berbeda dengan daerah lain, tentu kebijakan dan upaya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah juga berbeda. Tidak terkecuali kegiatan penyuluhan Agama Islam. Penyuluh adalah pihak atau individu yang diberikan tugas dan wewenang untuk memberikan pembinaan kepada masyarakat. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang, bahwa menurut keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 791 tahun 1985 tugas kewajiban Penyuluh Agama adalah sebagai pembimbing umat beragama dalam rangka melakukan pembinaan, sesuai dengan fungsinya. (Mujib, 2009)

Fungsi penyuluh agama dalam melakukan pembinaan, menurut Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 574 dan 178 tahun 1999 tentang jabatan fungsional penyuluh agama dan angka kreditnya, menyebutkan bahwa ada tiga fungsi penyuluh agama, yaitu; Fungsi *informatif* dan *edukatif*, Fungsi *konsultatif*, dan Fungsi *advokatif*. Ketiga fungsi ini adalah fungsi standar yang wajib dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam, tanpa terkecuali kegiatan penyuluhan yang terjadi di Daerah 3T Kecamatan Sajingan Besar.

Kegiatan penyuluhan dalam konteks disiplin ilmu komunikasi pada hakikatnya adalah proses interaksi hubungan antara penyuluh dengan binaannya. Sistem proses interaksi ini disebut disebut juga dengan pola komunikasi. Secara umum pola komunikasi merupakan sebuah sistem gambaran atau rancangan dari kegiatan komunikasi yang berlangsung antara Penyuluh dan binaannya. Tujuannya adalah agar kegiatan Penyuluh Agama Islam dalam menjalankan fungsi penyuluhan dapat berjalan dengan baik.

Kegiatan penyuluh keagamaan menjadi berbeda ketika dihadapkan dengan kondisi yang sulit, seperti kondisi geografis, sosial, budaya, Infrastruktur, pendidikan, ekonomi, dan tingkat kesadaran keagamaan masyarakat yang rendah. Kondisi keterbatasan tersebut tentu akan berdampak pada proses pembinaan keagamaan di Daerah 3T, sehingga pola komunikasi yang diterapkan oleh Penyuluh Agama Islam juga pasti berbeda.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian tentang Pola komunikasi Penyuluh Agama Islam dalam Membina Masyarakat di Daerah 3T Kecamatan Sajingan Besar sangat menarik untuk diteliti, terutama terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi

pokok Penyuluh Agama Islam, yang terdiri dari fungsi *informatif* atau *edukatif*, fungsi *konsultatif* dan fungsi *advokatif*.

Tugas dan fungsi penyuluhan tersebut merupakan tugas dan fungsi pokok yang menjadi standar kegiatan penyuluhan, baik itu di pusat sampai di daerah-daerah. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pembangunan di Daerah 3T Kecamatan Sajingan Besar khususnya dan di daerah lain umumnya. Mengingat peran Penyuluh Agama Islam dalam melakukan pembinaan kepada masyarakat merupakan upaya yang sangat urgen dalam menunjang pembangunan daerah-daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Studi Kasus (Yin, n.d.) yang bersifat *Instrumental*. Secara umum Alex Sobur menyebutkan bahwa cara kerja dari studi kasus adalah pengujian terhadap banyak karakteristik dari suatu objek. (Sobur, 2014) Objek yang dimaksudkan dijelaskan oleh Denzin bahwa penelitian studi kasus memiliki tiga karakteristik, yaitu Studi Kasus Intrinsik, Instrumental dan Kolektif. (Denzin, 2009) Merujuk ketiga jenis tersebut, karakteristik yang dipilih dalam penelitian ini adalah Studi Kasus *Instrumental*. (Komigi, 2015) Metode ini dipandang tepat, karena *Studi Kasus Instrumental* merupakan sebuah cara kerja penelitian kualitatif yang berusaha menguraikan persoalan penelitian kemudian menganalisis persoalan tersebut secara mendalam. Selain itu, cara kerja metode *studi kasus* merupakan bagian dari paradigma *naturalistik* dengan pendekatan *fenomenologi*. Relevansi metode studi kasus dengan penelitian ini adalah berawal dari fenomena kegiatan penyuluhan yang terjadi di Indonesia sekarang ini, atau lebih khususnya pola komunikasi Penyuluh Agama Islam dalam membina masyarakat di Daerah 3T Kecamatan Sajingan Besar.

Denzin menjelaskan dalam bukunya *Handbooks Of Qualitative Research* (Creswell, 2014), bahwa salah satu karakteristik penelitian studi kasus (*Studi Kasus Instrumental*) adalah penelitian yang berawal dari sebuah kasus, isu, fenomena tertentu, populasi atau kondisi umum suatu daerah yang menarik dari objek penelitian yang disajikan sebagai sebuah perspektif tertentu pula.

Cara kerja desain penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan. Merujuk pada desain metode penelitian yang dikemukakan oleh Robert K. Yin, bahwa ada tiga tahapan penting yang dilakukan dalam studi kasus. *Pertama*, adalah berawal dari pengembangan teori. *Kedua*, menunjukkan dan memilih kasus dan definisi ukuran (batasan). *Ketiga*, adalah proses pemilihan data sebelum dilakukan proses analisis data.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pola Komunikasi Penyuluh Agama dalam Melaksanakan Fungsi *Informatif* dan *Edukatif***

Pola komunikasi dalam kegiatan penyuluhan pada hakikatnya merupakan serangkaian bentuk kegiatan yang menggambarkan proses interaksi komunikasi

antara Penyuluh Agama dengan masyarakat binaannya. Selanjutnya, serangkaian bentuk proses interaksi inilah yang disebut dengan Pola komunikasi, khususnya kegiatan Penyuluh Agama Islam dalam Membina masyarakat 3T.

Penyuluhan Agama kepada masyarakat 3T, merupakan representasi dari salah satu bentuk kegiatan dakwah dan pendidikan. Kesamaan konsep dasar antara kedua bentuk kegiatan ini adalah memiliki dimensi dan tujuan yang sama yaitu untuk menyampaikan. Penyuluhan dan dakwah dalam literasi bahasa Arab memiliki konsep besar yang disebut sebagai *al-Wad'u* atau dengan istilah lain di masyarakat sering disebut dengan kegiatan *Tausyiah* atau orang yang memberikan *tauji*h.

Menurut Enjang AS dalam bukunya Dasar-dasar Bimbingan dan Penyuluhan Islam, bahwa penyuluhan adalah bagian dari kegiatan dakwah yang merupakan proses penyampaian ajaran Islam oleh seorang yang memenuhi standar kompetensi Penyuluh Agama sebagaimana yang telah ditentukan. Abdul Basit menyebutkan bahwa standar minimal yang dimiliki oleh seorang penyuluh Agama paling tidak ada empat kompetensi (Basit, 2013), yaitu di antaranya memiliki kemampuan secara substansi dalam memahami ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum lainnya, kemampuan sosial untuk membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat, kemampuan personal menyangkut citra penyuluh dan kemampuan metodologi terkait dengan metode penyuluhan sesuai dengan bentuk, pesan, media dan model komunikasi yang digunakan.

Bagi seorang Penyuluh Agama keempat kompetensi tersebut merupakan modal utama dalam memberikan penyuluhan. Tujuannya adalah agar fungsi penyuluh dalam memberikan bantuan pembinaan, pemberdayaan, penjelasan, peringatan, penyampaian dan pengajaran dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsi penyuluhan selaku *da'i* di masyarakat 3T. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa ayat 58, yaitu: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.

Kata *tu'aduu* dalam ayat di atas, menerangkan bahwa Allah memerintahkan kepada hambanya untuk menyampaikan pesan ajaran Islam kepada saudaranya (dalam hal ini termasuk juga masyarakat) yang merupakan saudara sesama muslim, termasuk juga muslim di daerah 3T.

Penyuluhan keagamaan, selain sebagai kegiatan dakwah juga merupakan bentuk kegiatan pendidikan yang menjadi bagian dari kerangka penyuluhan keagamaan sebagai fungsi *informatif* dan *edukatif*. Berbeda dengan kegiatan pendidikan formal pada umumnya, kegiatan pendidikan (*edukatif*) yang dilakukan oleh Penyuluh Agama merupakan bentuk kegiatan pendidikan non-formal di masyarakat 3T.

Bentuk kegiatan pendidikan non-formal ini berbeda dengan pendidikan formal di lembaga pendidikan, seperti sekolah, perguruan tinggi dan lembaga pendidikan formal lainnya. Pendidikan formal adalah pendidikan yang sifatnya lebih umum sesuai dengan tingkatan dan jenjangnya, sedangkan Pendidikan non-formal oleh Penyuluh Agama di masyarakat cenderung mengedepankan pada aspek pembinaan akhlak, moral, sosial yang berlandaskan ajaran dan syariat Agama Islam kepada masyarakat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah Yunus

ayat 57, yaitu:

“Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman”.

Menurut Enjang AS pembagian dalam konteks ilmu dakwah, penyuluhan keagamaan sebagai pendidikan non formal merupakan bagian dari dakwah *fi'ah qalilah*, yaitu dakwah yang dilakukan oleh seorang penyuluh kepada kelompok kecil (masyarakat 3T), baik itu berdialog secara tatap muka antar personal maupun berdialog tatap muka secara kelompok. Tujuan fungsi *edukatif* Penyuluh Agama sebagaimana disebutkan oleh Wahyu Ilahi bahwa prinsip penyampaian bagi seorang *da'i* salah satunya adalah suatu pekerjaan mendidik “manusia” agar bertingkah laku sesuai dengan hukum Islam.

Proses kegiatan penyuluhan melalui bentuk *Informatif* dan *Edukatif* yang dilakukan merupakan gambaran sebuah sistem, model atau bentuk komunikasi yang sedang berlangsung. Sebuah sistem terstruktur melalui unsur-unsur komunikasi inilah yang kemudian dianalisis sebagai gambaran bentuk pola komunikasi. Untuk mengetahui bentuk pola komunikasi Penyuluh Agama Islam dalam membina Masyarakat 3T, maka dapat dianalisis data lapangan tentang beberapa unsur penting dalam proses komunikasi yang dilakukan.

Menurut hasil observasi dan wawancara di lapangan, pola komunikasi penyuluhan yang dilakukan oleh Penyuluh Agama dalam membina masyarakat di daerah 3T dapat ditinjau dari beberapa aspek. *Pertama*, ditinjau dari bentuk kegiatan yang dilakukan oleh penyuluh Agama Islam di daerah 3T. Sesuai dengan fungsi *informatif* dan *edukatif* bentuk kegiatan penyuluhan yang dilakukan, terdiri dari *Taklim, Pengajian, BKMT, TPA, TPQ, Pelatihan, Khutbah Jumat, dan Ceramah*. *Kedua*, ditinjau dari jenis pesan yang disampaikan sesuai dengan bentuk kegiatan penyuluhan yang dilakukan. Jenis-jenis pesan yang disampaikan di antaranya pesan Aqidah, Fiqih, Akhlak, Muamalah dan Nasionalisme. *Ketiga*, ditinjau dari media yang digunakan dalam menyampaikan pesan penyuluhan. Media yang digunakan terdiri dari tulis bentuk di antaranya media cetak, media tulis dan media elektronik. Media cetak terdiri dari al-Qur'an, Kitab-kitab Hadis, buku-buku keagamaan dan media cetak lainnya seperti selebaran atau brosur.

Media tulis terdiri dari papan tulis. Sedangkan media elektronik terdiri dari proyektor. *Keempat*, ditinjau dari bentuk komunikasi yang digunakan. Bentuk komunikasi yang digunakan dalam kegiatan penyuluhan fungsi *informatif* dan *edukatif*, terdiri dari komunikasi personal, komunikasi kelompok dan komunikasi Massa.

Suatu proses komunikasi, selain sebagai bentuk kegiatan interaksi antara komunikator dengan komunikan juga merupakan representasi dari pola komunikasi yang terjadi. Untuk melihat bagaimana sebuah pola komunikasi dapat terbentuk, maka bisa dianalisis berdasarkan dua pendekatan teori, sebagaimana disebutkan oleh Onong Uchana bahwa proses dalam komunikasi dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu pada aspek psikologisnya dan mekanistiknya.

Kedua teori tersebut yang dipandang relevan untuk medeskripsikan proses komunikasi yang berlangsung, yaitu teori arah informasi sebagai representasi dari

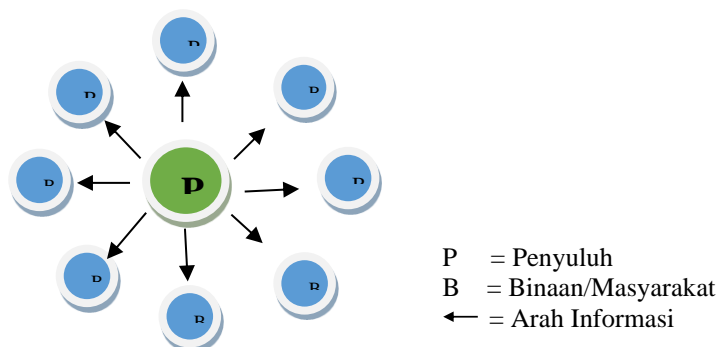
mekanistik proses komunikasi. Teori subjektivitas komunikator (*Teori Atribusi*) yang merupakan representasi dari aspek psikologis penyuluh Agama Islam di Daerah 3T selaku komunikator dalam menyampaikan informasi.

Merujuk pada bentuk penyuluhan yang telah dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam dalam menjalankan fungsi *informatif* dan *edukatif* di daerah 3T. Pola komunikasi Penyuluh Agama Islam ditinjau dari arah informasi dilakukan dalam dua bentuk pola, yaitu pola roda dan pola rantai. Kedua pola ini dapat tergambarkan sesuai dengan bentuk kegiatan, pesan yang disampaikan melalui media dalam bentuk komunikasi yang digunakan penyuluh.

Pola roda adalah pola yang menggambarkan arah informasi seseorang yang memberikan penyuluhan kepada binaannya dengan menyampaikan pesan yang sifatnya informasi dan edukasi. Pada pola roda ini, posisi sentral dari arah informasi adalah Penyuluh Agama, sedangkan masyarakat 3T atau binaannya menempati posisi sasaran dari arah informasi. Begitu pula dengan *feedback* dari sasaran, semua arah pesan kembali ke penyuluh Agama sebagai sentral komunikasi.

Bentuk pola roda yang dilakukan dapat dilihat dari bentuk kegiatan, taklim, ceramah, khutbah dan pelatihan sesuai dengan bentuk komunikasi yang digunakan yaitu komunikasi kelompok. Berikut gambar pola roda dalam bentuk komunikasi kelompok.

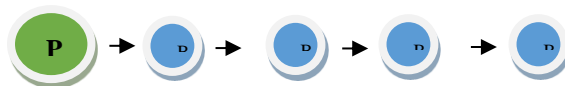
**Gambar 1.** Gambar Pola Roda



Berdasarkan gambar pola di atas, arah pesan yang disampaikan dari Penyuluh Agama mengarah kepada Masyarakat 3T (binaan). Arah pesan komunikasi dalam kegiatan fungsi *informatif* dan *edukatif* sangat tergantung dari bentuk komunikasi, pesan dan media yang digunakan dalam kegiatan penyuluhan. Khususnya dalam kegiatan ceramah atau Khutbah maka arah informasinya cenderung satu arah. Sedangkan kegiatan taklim dan pelatihan arah pesan komunikasinya terdiri dari dua arah dan sifatnya *feedback* kepada Penyuluh Agama.

Bentuk pola selanjutnya adalah pola rantai. Konsep pola rantai ini adalah arah pesan yang disampaikan sifatnya berantai dari sumber informasi. Arah informasinya dimulai dari Penyuluh Agama Islam kepada sasaran yaitu masyarakat 3T sebagai binaannya secara berlanjutan. Berikut gambar pola rantai dalam kegiatan fungsi *informatif* dan *edukatif*:

**Gambar 2.** Bentuk Pola Rantai



Bentuk kegiatan fungsi informasi dan edukasi yang dilakukan sesuai dengan arah informasi pola rantai adalah kegiatan TPA, TPQ dan BKMT. Pembinaan ini dilakukan kepada anak-anak dan ibu-ibu mualaf. Arah pesan yang disampaikan adalah Penyuluh Agama membina satu persatu baik itu anak-anak atau ibu-ibu. Kemudian bagi yang sudah bisa membaca dan bagus tajwidnya akan diminta untuk membantu mengajarkan baca al-Qur'an kepada anak atau ibu lainnya yang belum lancar membaca al-Qur'an.

Cara mengajarnya juga dilakukan secara berantai terus menerus sampai kepada anak atau terakhir yang hadir. Selain itu, Pola rantai ini juga dilakukan dalam kegiatan TPA di rumah masyarakat, dimana penyuluh datang langsung ke rumah masyarakat untuk mengajarkan baca al-Qur'an. Kemudian orang tua (mualaf) akan mengajarkan lagi kepada anak-anaknya, begitu juga seterusnya.

Berdasarkan kedua bentuk pola arah informasi yang dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam dalam melaksanakan fungsi *informatif* dan *edukatif* kepada masyarakat 3T. Pada hakikatnya bentuk pola yang digunakan sangat dipengaruhi oleh faktor subjektivitas komunikator. Faktor inilah yang disebutkan oleh Fritz Heider dengan teori Atribusi.

Steven W. Litlejohn dan Karen A. Foss menyebutkan bahwa konsep dasar dari teori Atribusi adalah menganalisis bagaimana tentang seseorang berperilaku. Berperilaku yang dimaksudkan di sini bukanlah sekedar berperilaku yang sifatnya bawaan yang melekat dalam diri, melainkan perilaku dalam arti sebuah tindakan yang muncul karena dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu.

Menurut Fritz ada beberapa Atribusi kausal yang mempengaruhi seorang melakukan suatu tindakan. Hubungannya dengan kegiatan Penyuluh Agama Islam dalam melaksanakan fungsi *Informatif* dan *Edukatif*, terdapat beberapa Atribusi kausal yang mempengaruhi bentuk kegiatan, pesan, media dan bentuk komunikasi yang digunakan dalam membina masyarakat di daerah 3T. Berdasarkan sumbernya, maka dapat dibagi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri, sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar kemudian mempengaruhi diri sendiri.

Hasil observasi dan wawancara di lapangan, merujuk pada teori Atribusi Fritz secara internal beberapa faktor yang mempengaruhi Penyuluh Agama Islam dalam melakukan pola komunikasi penyuluhan sesuai dengan fungsi *informatif* dan *edukatif*. Faktor-faktor yang dimaksudkan di antaranya dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu latar belakang, standar kompetensi, hasrat, keterlibatan dan perasaan.

Latar belakang adalah berkaitan dengan profil dari penyuluh agama di Daerah 3T, atau istilah lain disebutkan oleh Abdul Basit dengan kemampuan substantif. Menurut data Penyuluh Agama Islam berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sambas Nomor 02 Tahun 2017, menerangkan bahwa dari keenam Penyuluh Agama Non PNS, tiga orang Penyuluh Agama Fungsional dan satu orang Penyuluh PEMDA tidak ada satu pun yang merupakan penduduk asli daerah 3T di Kecamatan. Sebagian besar adalah

pendatang berasal dari pulau Jawa yang sudah menetap lama di Kecamatan Sajingan Besar. Sebagiannya lagi berasal dari daerah-daerah lain di Kabupaten Sambas yang sudah lama menetap di Sajingan Besar.

Merujuk pada latar belakang tersebut, maka bisa dikatakan bahwa meskipun secara kependudukan Penyuluh Agama Islam di daerah 3T bukanlah penduduk asli, melainkan pendatang yang sudah lama menetap. Tetapi, secara sosio psikologi juga dapat dikatakan bahwa pemahaman Penyuluh Agama terhadap budaya dan setting sosial masyarakat di Kecamatan Sajingan Besar cukup mendalam. Kedekatan secara psikologis inilah kemudian akan mempengaruhi terhadap kemampuan sosial penyuluh. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Sunaryo menyebutkan bahwa keduanya merupakan penduduk Muslim awal yang menetap di Kecamatan Sajingan Besar yaitu sekitar 20-25 Tahun yang lalu.

“Saya (Bapak Sunaryo) sudah lama tinggal di Kecamatan Sajingan besar. Sejak tahun 1992-an saya sudah datang ke sini. Pada mulanya adalah sebagai pekerja di perusahaan kayu, lama-lama dapat istri dan menikah dengan orang sini, maka saya menetap tinggal di sini sampai sekarang ini. Kami pada mulanya hanya 3 orang yang agama Islam di Sajingan ini, lama kelamaan melalui dakwah dan ditambah dengan datangnya para *imigran* ke sini, jumlah muslim di sini terus bertambah. Mulai dari mualaf hanya Lima orang sampai sekarang ini khusus di Dusun Tanjung berjumlah 45 mualaf.

Merujuk pada pernyataan bapak Sunaryo di atas, maka latar belakang penyuluh agama yang sudah lama menetap di daerah 3T di Kecamatan Sajingan Besar ini menerangkan bahwa secara sosio psikologi komunikasi cukup mengerti dan memahami sosial budaya sasaran kegiatan penyuluhan di daerah 3T.

Faktor internal lainnya yang tidak kalah penting adalah standar kompetensi yang dimiliki oleh Penyuluh Agama Islam di daerah 3T. Berdasarkan data penyuluh di Kecamatan Sajingan Besar hampir sebagian besar tidak lulus sarjana dan rata-rata adalah berpendidikan SD, SMP, SMA dan hanya satu orang yang lulusan S1.

Meskipun pendidikan Penyuluh Agama dibawah rata-rata, tetapi kebijakan standar pengangkatan penyuluh di Kabupaten Sambas pada umumnya dan di Daerah 3T khususnya, lebih mengedepankan pada empat aspek kompetensi yang wajib dimiliki oleh Penyuluh Agama Islam non PNS, yaitu memiliki kompetensi ilmu Agama yang mumpuni (dipandang sebagai orang yang berilmu oleh masyarakat), komunikasi yang baik dalam kegiatan keagamaan (Khutbah, berceramah, dan mampu memberikan solusi keagamaan), aktif di kegiatan sosial, dan dipandang berakhlak baik di masyarakat. Merujuk pada standar kompetensi yang telah ditetapkan oleh Kementrian Agama RI, maka Penyuluh Agama Islam di Daerah 3T, dapat dikatakan telah memenuhi standar kompetensi penyuluh Agama meskipun pendidikannya masih di bawah rata-rata minimal yang ditetapkan.

Faktor internal lainnya yang juga ikut mempengaruhi bentuk pola komunikasi penyuluh Agama dalam membina masyarakat 3T adalah hasrat dan perasaan. Sebagai bagian dari masyarakat yang berada di daerah yang termarginalkan dari pusat pemerintahan, maka secara psikologi tentu merasa keterikatan dengan hasrat dan perasaan untuk maju dan berubah ke arah lebih baik. Satu diantara tindakan yang muncul dari hasrat dan perasaan tersebut adalah

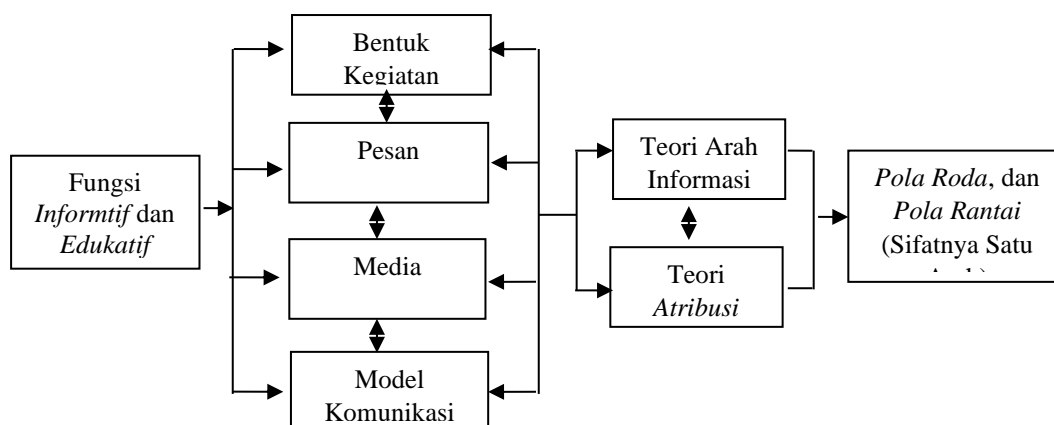
semangat yang tinggi dalam kegiatan penyuluhan khususnya menyampaikan informasi dan pendidikan kepada masyarakat di daerah 3T.

Kondisi sosial lainnya adalah masyarakat muslim di Daerah 3T merupakan masyarakat minoritas, sehingga banyak hal yang perlu dipertimbangkan ketika seorang penyuluh melakukan kegiatan fungsi *informatif* dan *edukatif* di masyarakat. Seperti bentuk kegiatan yang dilakukan, pesan yang disampaikan, media dan bentuk komunikasi yang digunakan. Karena informasi yang disampaikan akan membentuk persepsi tersendiri bagi masyarakat, oleh sebab itu sangat diperhitungkan konten informasi yang diberikan agar tidak menimbulkan kesenjangan sosial di masyarakat.

Faktor eksternal lainnya yang ikut mempengaruhi di antaranya adalah bentuk usaha (pendekatan), kegiatan penyuluhan yang dilakukan lainnya yang menunjang untuk memudahkan penyampaian informasi dan pendidikan kepada masyarakat 3T. Kemudian adalah faktor kewajiban dan perizinan. Kedua faktor ini adalah faktor yang berkaitan dengan beban moral dan tanggung jawab sosial selaku Penyuluh Agama Islam. Sejalan dengan tugas dan fungsi penyuluh adalah memberikan penyuluhan kepada masyarakat sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya.

Berdasarkan pembahasan di atas, secara khusus pola komunikasi yang dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam dalam melaksanakan fungsi *Informatif* dan *Edukatif* kepada masyarakat 3T cenderung bersifat satu arah. Sifat ini dapat dilihat dari bentuk pola yang digunakan, yaitu pola roda dan pola rantai. Konsep dasar dari kedua pola ini adalah menggambarkan arah pesan dari Penyuluh Agama sebagai posisi sentral, dalam melaksanakan fungsi *informatif* dan *edukatif* kepada masyarakat 3T di Kecamatan Sajingan Besar. Selanjutnya, dapat disimpulkan bahwa secara subjektivitas penyuluh Agama Islam di Daerah 3T, memilih kedua pola ini adalah dikarenakan oleh faktor situasional, kepribadian dan sosial budaya masyarakat yang relatif pasif, sehingga bentuk pola komunikasi yang digunakan juga berbeda dengan daerah lain, yaitu sangat tradisional.

**Gambar 3.** Skema Pola Komunikasi Penyuluh Agama Islam dalam Melaksanakan Fungsi *Informatif* dan *Edukatif*



### **Pola Komunikasi Penyuluh Agama dalam Melaksanakan Fungsi *Konsultatif***

Pola komunikasi Penyuluh Agama dalam kegiatan fungsi *Konsultatif*, pada

dasarnya merupakan serangkaian kegiatan penyuluhan secara umum. Karena tugas dan fungsi pokok penyuluh atau konselor (orang yang memberikan konsultasi) adalah kegiatan penyampaian informasi. Namun yang membedakan kegiatan konsultasi dalam kegiatan penyuluhan dengan kegiatan konsultasi lainnya adalah pada dimensi substansi isi, proses kegiatan dan pihak yang menjadi konselornya.

Dimensi isi dan pihak yang memberikan konsultasi pada fungsi *konsultatif* dalam kegiatan penyuluhan secara umum juga bersifat umum, seperti penyuluhan pertanian yang memberikan bimbingan tentang pertanian dan masalah seputar pertanian. Penyuluhan dalam bidang kesehatan akan dilakukan oleh pihak kesehatan yang memberikan bimbingan dan konsultasi tentang kesehatan. Sedangkan kegiatan konsultasi dalam penyuluhan keagamaan cenderung pada persoalan sosial keagamaan di masyarakat.

Pihak yang menjadi konselornya atau pihak yang memberikan konsultasi kepada masyarakat adalah seseorang atau sekelompok orang yang ditugaskan untuk membimbing masyarakat tentang sosial keagamaan di masyarakat. Pada konteks penyuluhan keagamaan inilah yang disebut dengan istilah Penyuluh Agama Islam dalam menjalankan fungsi *konsultatif*. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Petunjuk Teknis Pengangkatan Penyuluh Agama Islam Non PNS, bahwa terkait dengan tugas dan fungsi kedua dari Penyuluh Agama Islam adalah fungsi *Konsultatif*.

Dimensi lainnya yang membedakan fungsi *konsultatif* pada kegiatan penyuluhan keagamaan dengan kegiatan penyuluhan lainnya adalah pada proses kegiatan. Telah disebutkan sebelumnya, bahwa dalam fungsi *konsultatif* Penyuluh Agama Islam adalah memberikan pembimbingan kepada masyarakat guna memberikan solusi dalam persoalan sosial keagamaan yang dihadapi oleh masyarakat. Oleh sebab itu, proses kegiatan *Konsultatif* atau konsultasi disebut juga dengan proses bimbingan dan konseling. Kedua proses kegiatan ini seringkali disebut secara bersamaan, meskipun pada dimensi proses kegiatannya memiliki perbedaan.

Enjang AS menyebutkan bahwa bimbingan dengan konseling memiliki dimensi perbedaan tersendiri dalam proses kegiatannya. Menurut Enjang AS, Bimbingan atau *Guidance* dalam literasi bahasa Inggris terambil dari akar kata *Guid* yang memiliki arti *showing the way* (menunjukkan jalan), *leading* (menuntun), *conducting* (memimpin), *giving instruction* (memberikan petunjuk), *regulating* (mengatur), *governing* (mengarahkan), dan *giving advice* (memberikan nasihat). Sedangkan konseling atau *causeling* terambil dari kata *to counsel* yang memiliki arti memberikan nasihat atau anjuran kepada orang lain secara tatap muka, baik itu secara personal maupun kelompok.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat dikatakan bahwa proses kegiatan penyuluh Agama dalam menjalankan fungsi *konsultatif* bukanlah sekedar memberikan dan menyampaikan informasi. Melainkan merupakan kegiatan bimbingan dan konseling kepada masyarakat di Daerah 3T Kecamatan Sajingan Besar, khususnya dalam persoalan sosial keagamaan.

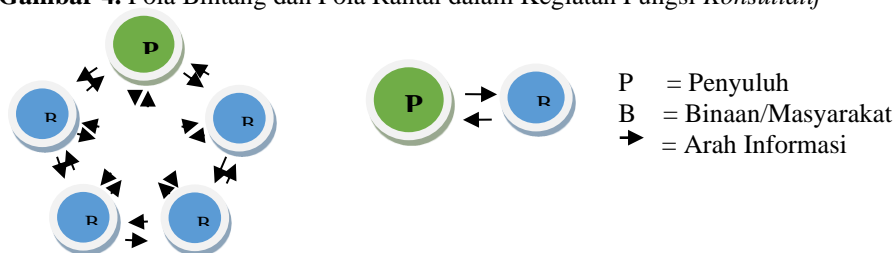
Sejalan dengan pandangan Prayitno, yang menjelaskan bahwa proses kegiatan penyuluhan cenderung menekankan pada penjelasan dan penerangan

tentang sesuatu, sedangkan konseling lebih mengutamakan tentang penanganan dan solusi penyelesaian kasus-kasus. Kasus yang dimaksudkan pada konteks Penyuluh Agama adalah kasus sosial keagamaan di masyarakat, seperti kasus perceraian, kenakalan remaja, kriminilitas dan kasusu lainnya, khususnya di Daerah 3T.

Terkait dengan kegiatan fungsi *konsultatif* yang dilakukan oleh Penyuluh Agama di Daerah 3T Kecamatan Sajingan Besar. Menurut hasil observasi dan wawancara di lapangan, beberapa bentuk kegiatan yang dilakukan diantaranya, secara umum melalui dua bentuk kegiatan, yaitu silaturahmi dan pengajian. Sedangkan pesan yang disampaikan dalam kegiatan bimbingan dan konseling tidak lepas dari tiga aspek yaitu aqidah, syariat atau fiqih, dan Muamalah. Media yang digunakan dalam proses kegiatan *konsultatif* sifatnya langsung, karena komunikasi yang digunakan juga sifatnya personal. Kecuali kegiatan yang sifatnya kelompok yaitu konsultasi di KUA, Masjid dan tempat pertemuan lainnya.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di atas, bentuk pola komunikasi Penyuluh Agama Islam dalam menjalankan fungsi *konsultatif* sangat berbeda sekali dengan fungsi *informatif* dan *edukatif*. Ditinjau dari teori arah informasi dalam proses komunikasinya bentuk pola yang digunakan cenderung bersifat dua arah informasi, yaitu bentuk pola komunikasi dengan Pola Bintang dan Pola Rantai. Berikut gambar arah informasi dari pola bintang dalam proses komunikasi Penyuluh Agama Islam membina masyarakat di Daerah 3T sesuai fungsi *konsultatif*.

**Gambar 4.** Pola Bintang dan Pola Rantai dalam Kegiatan Fungsi *Konsultatif*



Konsep dasar pola Bintang, menurut H.A.W Widjaja adalah proses komunikasi yang menggambarkan arah informasi dari semua anggota, yang artinya bahwa arah informasi yang terbangun terdiri dua arah atau secara timbal balik. Berdasarkan pola bintang yang digambarkan, bahwa arah informasi tidak terpaku kepada penyuluh Agama. Tetapi bisa saja dari masyarakat yang menyampaikan informasi terlebih dahulu kepada Penyuluh Agama, kemudian Penyuluh Agama merespon dan menanggapi keluhan, pertanyaan dan permintaan dari masyarakat mengenai persoalan keagamaan yang dihadapi. Untuk arah informasi seperti ini, sering dilakukan oleh Penyuluh Agama dengan Masyarakat di tempat tinggal Penyuluh Agama atau di Kantor KUA, di Masjid, dan ditempat Pengajian, karena sifatnya masyarakat yang memulai proses konseling.

Sebaliknya, proses arah informasi di mulai dari Penyuluh Agama menyampaikan atau memberikan bimbingan kepada masyarakat, baik itu datang secara langsung ke rumah masyarakat, di warung-warung dan di tempat kerja. Bentuk kegiatan inilah yang disebutkan dengan bentuk kegiatan silaturahmi penyuluh ke masyarakat.

Berdasarkan kedua arah informasi dalam proses *konsultatif* di atas, bentuk komunikasi yang terjadi terbagi menjadi dua, yaitu secara personal dan secara kelompok. Bentuk komunikasi secara personal, pola komunikasi yang digunakan cenderung pada pola rantai, sedangkan bentuk komunikasi kelompok pola komunikasi yang digunakan lebih pada pola bintang. Penggunaan kedua bentuk pola komunikasi dalam proses penyuluhan *konsultatif* sama halnya dengan fungsi-fungsi lainnya, yaitu sangat dipengaruhi oleh subjektivitas komunikator atau disebut dengan teori *atribusi*. Konsep dasar teori ini menurut Fritz adalah bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan seseorang yang melakukan tindakan.

Merujuk pada teori subjektivitas Penyuluh Agama di Daerah 3T beberapa faktor mempengaruhi bentuk pola komunikasi yang digunakan dalam menjalankan fungsi *konsultatif*, di antaranya terbagi menjadi dua yaitu secara internal dan eksternal. Secara internal faktor penyebab yang mempengaruhi tindakan Penyuluh Agama dalam melakukan fungsi *konsultatif* adalah dikarenakan faktor psikologi. Dimesni faktor ini diantaranya berkaitan dengan pribadi penyuluh agama yang merasakan kedekatan dengan masyarakat, karena sudah menjadi bagian dari masyarakat 3T di Kecamatan Sajingan Besar.

Faktor lain secara eksternal yang ikut mempengaruhi adalah situasi lingkungan atau kondisi objektif daerah 3T. Kondisi lingkungan juga memberikan pengaruh kepada penyuluh dalam melakukan penyuluhan. Aspek penting yang dimaksudkan dalam ini adalah berkaitan dengan beberapa hal, diantaranya lingkungan yang berbeda dengan daerah lain.

Kondisi lingkungan di daerah 3T ditinjau dari aspek geografisnya adalah daerah yang terletak jauh dari perkotaan, terletak di daerah perbukitan dan pegunungan, serta tata letak pemukiman yang sifatnya menyebar tidak merata, sehingga sangat berpengaruh terhadap penentuan pola komunikasi. Terutama dalam proses kegiatan fungsi *konsultatif*, seperti dilakukannya kunjungan penyuluh ke rumah-rumah masyarakat atau sebaliknya dalam komunikasi personal, atau dilakukannya proses konsultasi atau konseling dalam kegiatan pengajian dan taklim. Mengingat sangat sulit sekali untuk bertemu secara rutin dengan masyarakat, karena kondisi lingkungan tidak memungkinkan.

Faktor lain yang menyebabkan pola komunikasi digunakan dalam proses penyuluhan fungsi *konsultatif* adalah sosial budaya masyarakat di Daerah 3T. Masyarakat di Kecamatan Sajingan Besar dikenal sebagai masyarakat yang mengandalkan pada mata pencaharian dengan mengolah lahan menjadi lahan pertanian dan perkebunan. Akibatnya banyak waktu dan tenaga yang dihabiskan untuk bekerja di kebun dan di ladang.

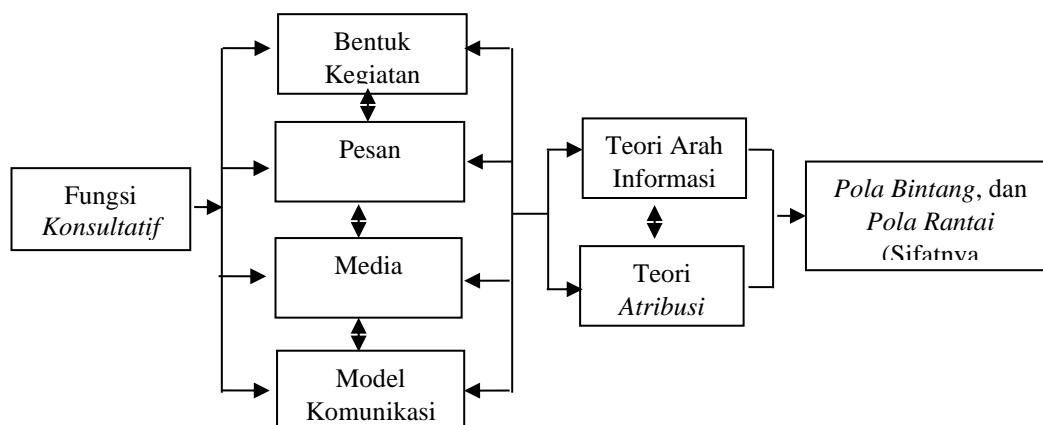
Faktor ini juga yang menjadi alasan mengapa dalam beberapa kesempatan penyuluh atau masyarakat melakukan kegiatan konseling. Terutama pada saat istirahat atau pulang kerja dari kebun, baik itu di kebun atau diwarung-warung proses konsultasi tentang persoalan sosial keagamaan dilakukan. Pada kondisi seperti inilah sering terjadi proses komunikasi dengan pola rantai yang digunakan oleh Penyuluh Agama Islam kepada Masyarakat di Daerah 3T, karena sifat arah pesannya dan bentuk komunikasinya terjadi secara personal. Waktu kegiatannya

juga tidak terjadwal seperti kegiatan lainnya.

Berdasarkan pembahasan di atas, merujuk pada aspek psikologis dan mekanistik proses komunikasi, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pola komunikasi yang dibangun oleh Penyuluh Agama dalam menjalankan fungsi *Konsultatif* cenderung bersifat personal dan dialogis. Adapun sifat arah pesan yang dibangun tergambar melalui pola bintang dan rantai cenderung dua arah. Melalui kedua pola komunikasi ini, tergambar rasa kedekatan dan efektivitas penyuluhan terbangun dengan baik dalam kegiatan memberikan bimbingan dan konseling kepada masyarakat 3T. Karena secara psikologis Penyuluh Agama memahami betul kondisi sosial budaya yang ada di Daerah 3T Kecamatan Sajingan Besar.

Faktor lain adalah dikarenakan kondisi geografis yang tidak memungkinkan untuk melakukan kegiatan bimbingan dan konseling secara rutin dalam bentuk kegiatan-kegiatan formal lainnya, sehingga penyuluh Agama relatif memanfaatkan waktu dan kesempatan ketika bertemu sapa dengan masyarakat di berbagai kesempatan. Oleh sebab itu, pola komunikasi dengan pola bintang dan rantai merupakan pola efektif dalam melakukan proses penyuluhan *konsultatif*. Mengingat dalam proses *konsultatif* bagi masyarakat di Daerah 3T berbeda dengan daerah lainnya, sehingga sangat memerlukan perhatian lebih agar peran penyuluh sebagai pemimpin, motivator, fasilitator dan inovator, dapat dijalankan baik.

**Gambar 5.** Skema Pola Komunikasi Penyuluh Agama Islam dalam Melaksanakan Fungsi *Konsultatif*



### **Pola Komunikasi Penyuluh Agama dalam Melaksanakan Fungsi *Advokatif***

Penyuluh Agama pada umumnya adalah pihak yang memberikan penyuluhan kepada seseorang atau kelompok orang yang sedang mengalami persoalan dalam hidupnya. Peran dan Tugas Penyuluh Agama Islam tidak terbatas pada penyampaian informasi dan edukasi dan konsultasi terkait persoalan keagamaan semata. Melainkan, Penyuluh Agama Islam memiliki tanggung jawab besar lainnya yaitu tanggung jawab moral dan tanggung jawab sosial untuk melakukan kegiatan yang menyangkut pembelaan terhadap umat atau masyarakat binaannya dari berbagai ancaman, gangguan, hambatan dan bahkan tantangan yang merugikan akidah, mengganggu ibadah dan merusak akhlak serta stabilitas nasionalisme. Sesuai dengan peran dan tugas inilah penyuluh Agama memiliki Fungsi *Advokatif* yang berperan besar sebagai “*agen of change*” untuk menjaga

kedamaian dan kedaulatan NKRI.

Peran Penyuluh agama dalam menjalankan fungsi advokasi memanglah besar. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa selama ini belum sepenuhnya dapat dijalankan oleh Penyuluh Agama Islam pada umumnya. Termasuk di daerah-daerah yang memiliki keterbatasan baik itu saran dan prasarana, infrastruktur pembangunan, dan paling utama adalah SDM masyarakat yang rendah. Satu contoh di antaranya adalah Daerah 3T di Kecamatan Sajingan Besar.

Mengingat kondisi Daerah 3T di Kecamatan Sajingan Besar adalah daerah yang rawan sekali terhadap kasus-kasus. Mulai dari kasus tingkat rendah seperti CuranMor, Perjudian, Ilegaloging, sampai pada kasus besar seperti Taffiking, SanPi. Bahkan sampai kasus Narkotika, seperti dikatakan oleh Surprayitno Anggota POLSEK Kecamatan Sajingan Besar, untuk tahun 2016 pernah dilakukan penangkapan terhadap pelaku pengedar Narkotika dengan barang bukti 6 Kg Sabu dan 39.744 buah ekstasi di daerah Bordir Aruk Sajingan Besar.

Fakta kondisi sosial masyarakat yang rentan terhadap krisis moral dan identitas tersebut, menyebabkan persoalan yang dihadapi menjadi lebih besar dan berat bagi Penyuluh Agama Islam di Daerah 3T Kecamatan Sajingan Besar khususnya. Karena sasaran Penyuluhan Agama Islam adalah kelompok-kelompok masyarakat Islam yang terdiri dari berbagai latar belakang sosio cultural, baik itu secara umum maupun khusus. Tidak hanya itu, masyarakat muslim di Kecamatan Sajingan Besar merupakan masyarakat yang minoritas. Ditambah pemetaan kelompok sasaran yang menyebar dan tidak merata dengan jarak yang relatif jauh, sehingga Penyuluhan Agama Islam di daerah 3T dalam melakukan pendekatan dengan bentuk kegiatan, penentuan materi penyuluhan, media yang digunakan serta bentuk komunikasi yang dipilih juga relatif berbeda dan terbatas sesuai dengan yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran.

Melihat beberapa hal penting di atas, maka Penyuluhan Agama dituntut memiliki pola komunikasi yang tepat agar tujuan pokok penyuluhan Agama dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan masyarakat terhadap TuhanNya, serta pengamalan ajaran agama untuk tetap berbakti pada Nusa dan Bangsa bisa dijalankan dengan baik. Sesuai peran dan tugas Penyuluh Agama Islam dalam menjalankan fungsi *advokatif*, yaitu memberikan pembelaan kepada masyarakat dari berbagai ancaman terhadap gangguan akidah, ibadah, akhlak dan Nasionalisme masyarakat. Selain itu, fungsi *advokatif* juga memberikan pembelaan kepada masyarakat guna ikut serta dalam membangun daerah-daerah tertinggal menjadi daerah yang maju dan berkembang.

Menurut hasil observasi dan wawancara di lapangan dengan penyuluh atau pihak yang terlibat dengan kegiatan penyuluhan di Daerah 3T Kecamatan Sajingan Besar, beberapa bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam dalam menjalankan fungsi *advokatif* di antaranya kegiatan Pelatihan, Sosialisasi, Ceramah atau Khutbah jumat, dan Diskusi dalam bentuk kegiatan pengajian-pengajian. Berbeda dengan fungsi *Konsultatif*, *Informatif* dan *Edukatif* bentuk kegiatan *Advokatif* ini sering dilakukan dengan bekerjasama dengan Pihak Kepolisian, LIBAS dan Sekolah. Pesan-pesan yang disampaikan juga berbeda, yaitu sifatnya *advokatif* seringkali disinergikan dengan sasaran paradigma pembangunan daerah

tertinggal, terdepan dan terluar (3T).

Adapun pesan atau materi yang disampaikan adalah mengenai aqidah Islam yang benar, yaitu tetap menjaga meyakini kebenaran Agama masing-masing. Kemudian pesan muamalah, yaitu tetap menjaga hubungan antar agama dan budaya. Sedangkan pesan Nasionalisme, yaitu menanamkan rasa kecintaan yang tinggi terhadap NKRI dan menjaga stabilitas Negara dengan ikut serta menjaga daerah terluar dan terdepan dari pengaruh-pengaruh luar.

Ditinjau dari media yang digunakan oleh Penyuluh Agama dalam menjalankan fungsi *advokatif*, terdiri dari Al-Qur'an, Kitab-kitab dan Buku Keagamaan untuk mengajarkan tentang pesan aqidah dan muamalah. Sedangkan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Daerah adalah untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat, bahwa segala persoalan yang menyangkut pembangunan di daerah terdepan dan terluar merupakan prioritas dari Pemerintah. Selain itu, media lain yang digunakan adalah Selebaran, Spanduk, Proyektor, dan Sound Sistem.

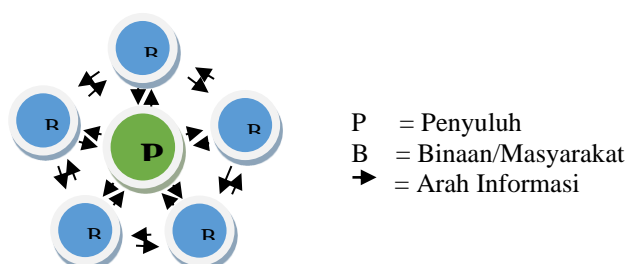
Ditinjau dari bentuk komunikasi yang dipilih Penyuluh Agama Islam dalam melaksanakan Fungsi *Advokatif* adalah terdiri dari dua bentuk yaitu komunikasi kelompok dan komunikasi massa. Untuk komunikasi kelompok bentuk kegiatan yang dilakukan adalah Pelatihan, Ceramah atau Khutbah, dan diskusi di Pengajian. Sedangkan untuk komunikasi Massa bentuk kegiatan penyuluhan dilakukan adalah melalui Selebaran brosur, Spanduk dan Baliho.

Merujuk data hasil penelitian di lapangan tersebut, dapat digambarkan bahwa pola komunikasi Penyuluh Agama Islam dalam menjalankan fungsi *Advokatif* terdiri dari beberapa bentuk Pola Komunikasi. Ditinjau dari aspek mekanistik berdasarkan teori Arah Informasi dalam proses Komunikasi, Pola Komunikasi yang digunakan oleh Penyuluh Agama Islam di Daerah 3T adalah Pola Bintang, Pola Roda dan Pola Lingkaran. Ketiga Pola Komunikasi yang terjadi dalam proses penyuluhan sebagai fungsi *advokatif* berdasarkan konsep dasar yang dijelaskan oleh Widjaja, bahwa pada dasarnya arah informasi pada pola roda sifatnya posisi penyuluh adalah sentral dari sumber dan *feedback* pesan komunikasi. Sedangkan untuk pola bintang arah informasi tidak terpaku pada penyuluh namun semua komunikatornya sifatnya aktif. Begitu pula dengan Pola Lingkaran, mekanisme yang terjadi menggambarkan arah informasi dari Penyuluh Agama Islam kepada masyarakat kemudian sifatnya merantai dan kembali kepada Penyuluh Agama Islam lagi sebagai respon dari masyarakat.

Berdasarkan arah informasi dari pola Roda yang digunakan di atas, dapat dikatakan bahwa bentuk penyuluhan dari pola Roda dalam fungsi *Advokatif* Penyuluh Agama Islam memiliki perbedaan dan persamaan dengan Pola Roda dalam fungsi *Informatif* dan *edukatif*, yaitu memiliki posisi sentral informasi untuk melakukan pembelaan kepada masyarakat. Misalnya dalam kegiatan khutbah jumat. Artinya segala bentuk pembelaan tergantung pada Penyuluh Agama untuk mengolah dan membimbing pesan komunikasi sesuai dengan konteks sarana dan prasarana di lapangan. Sebagaimana disebutkan oleh Pace dan Faules bahwa pola roda pada dasarnya adalah menggambarkan arah informasi yang memfokuskan satu orang sebagai sentral dalam proses komunikasi. (Muridan, 2007)

Adapun perbedaan Pola Roda yang digunakan dalam fungsi *advokatif* dengan fungsi *Informatif* dan *edukatif* adalah terletak pada bentuk *feedback* pesan yang disampaikan. Informasi awal bisa datang dari Masyarakat selaku sarannya, karena dalam berbagai kesempatan yang pertama kali meminta pembelaan terkait dengan persolan yang dihadapi datang dari masyarakat sendiri, kemudian disampaikan kepada Penyuluh Agama atau pihak yang hadir dalam kegiatan penyuluhan, yaitu Kepolisian, LIBAS dan KUA. Kemudian arah informasi pesan (*Feedback*) hampir sama dengan Pola Bintang, yaitu sifatnya posisi sentral tidak terpaku pada penyuluh, tetapi bisa saja dari masyarakat ke masyarakat kemudian menuju Penyuluh Agama. Bentuk pola roda dalam fungsi *advokatif* ini diantaranya adalah dalam kegiatan Pelatihan, Sosialisasi dan diskusi pengajian. Berikut ini gambar pola komunikasi dari arah Informasi dalam bentuk penyuluhan fungsi *Advokatif*, sesuai dengan bentuk kegiatan, pesan, media dan bentuk komunikasinya.

**Gambar 6.** Arah Informasi dari Pola Roda dalam Kegiatan Fungsi *Advokatif*



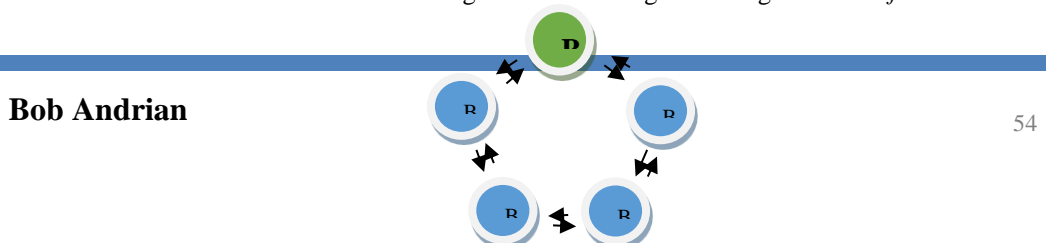
Bentuk pola komunikasi lainnya yang digunakan adalah pola lingkaran. Menurut Widjaja sifat arah informasi dari Pola lingkaran ini tidak ada seorang pun yang dapat menempati posisi sentral dan arah informasi yang disampaikan hanya melalui satu jenis sistem pengulangan pesan. Sejalan dengan padangan Pace dan Faules yang menyebutkan, bahwa konsep dasar pola lingkaran ini tidak ada satupun komunikator dan komunikan yang memiliki akses langsung terhadap seluruh informasi yang disampaikan, sebagai contoh seperti seorang yang menyampaikan pesan melalui pengumuman atau sejenisnya.

Terkait dengan pola lingkaran yang digunakan dalam proses penyuluhan dalam menjalankan fungsi *Advokatif*, penyuluh bekerjasama dengan pihak luar, yaitu membuat selebaran, sepanduk dan baliho tentang Bahaya Narkoba, Jaga Kebersihan, yang dipasang di tempat-tempat umum.

Pesan yang disampaikan dalam bentuk komunikasi melalui media cetak ini adalah agar masyarakat selalu membaca dan mengingat bahwa larangan dan peringatan yang disampaikan merupakan bentuk pembinaan untuk menjaga kedamaian dan keamanan di daerah mereka. Sehingga dapat dikatakan bahwa arah informasi yang disampaikan dapat diterima oleh masyarakat meskipun tidak bertemu secara langsung, dan sifatnya satu arah sehingga *feedback* yang di sampaikan oleh masyarakat akan diterima oleh Penyuluh Agama itu sendiri.

Berdasarkan arah informasi yang terjadi, maka Pola Komunikasi dalam menjalankan Fungsi *Advokasi* dapat digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 7.** Pola Lingkaran dalam Kegiatan Fungsi *Advokatif*



P = Penyuluh  
B = Binaan/Masyarakat  
➔ = Arah Informasi

Merujuk pada teori Atribusi yang dikembangkan oleh Fritz, menyebutkan bahwa terdapat beberapa alasan atau faktor penyebab Penyuluh Agama Islam Daerah 3T menggunakan bentuk pola komunikasi tertentu, terutama dalam menjalankan fungsi *Advokatif*. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara secara langsung dengan objek penelitian, diperoleh data objektif yang menjelaskan tentang alasan atau faktor penyebab tindakan oleh Penyuluh Agama Islam dalam melakukan pembelaan kepada masyarakat di daerah 3T.

Faktor utama yang menjadi alasan Penyuluh Agama memilih pola roda, bintang dan lingkaran adalah menyangkut lingkungan. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa kondisi sosial budaya masyarakat 3T di Kecamatan Sajingan Besar sangat rawan dan rentan terhadap krisis identitas, sosial, mora, budaya dan rasa nasionalisme. Sebagaimana disebutkan oleh Ardinen, Abu Salam dan Suharmi, menyebutkan bahwa faktor penyebabnya adalah rendahnya SDM, pembangunan yang lamban di Kecamatan Sajingan Besar, sehingga masyarakat banyak yang merasa terisolir dibanding dengan daerah lainnya.

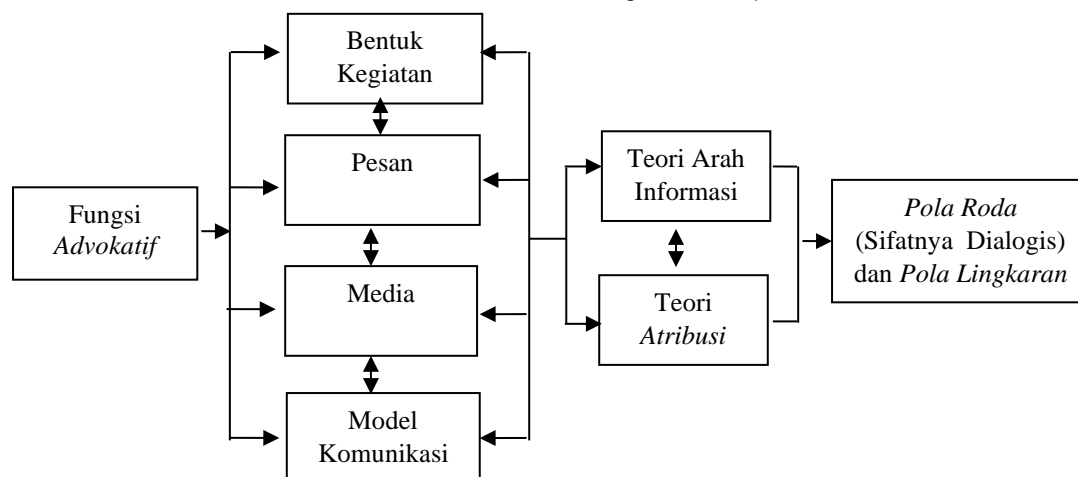
Faktor lainnya adalah berkaitan dengan Kompetensi yang dimiliki Penyuluh Agama Islam di Daerah 3T. Faktor kompetensi ini memiliki pengaruh besar dalam bentuk penyuluhan advokasi, karena secara teknis *Advokatif* merupakan tanggung jawab Penyuluh Agama, tetapi kapasitas yang dimiliki belum memadai untuk menyampaikan secara langsung. Oleh sebab itu, dalam melaksanakan fungsi advokasi ini, Penyuluh Agama Islam di Daerah 3T bekerjasama dengan pihak Kepolisian, LIBAS dan KUA. Alasannya adalah karena ketiga pihak tersebut memahami betul persoalan yang terjadi serta cara penanganannya.

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa ditinjau dari bentuk pola komunikasi arah informasi dan subjektivitas Penyuluh Agama dalam menjalankan fungsi *advokatif* cenderung bersifat kelompok dan massa. Berbeda dengan bentuk kegiatan fungsi *informatif*, *edukatif* dan *konsultatif*, untuk komunikasi kelompok dalam kegiatan fungsi *advokatif* sifat arah pesannya cenderung dua arah. Sedangkan untuk komunikasi massa, media yang digunakan cenderung menggunakan media cetak dengan sifat arah pesan cenderung satu arah yang arahnya merantai.

Secara umum pendidikan rata-rata Penyuluh Agama Islam di Kecamatan Sajingan Besar adalah tamatan SMA sederajat. Sedangkan melihat sasaran dari binaan penyuluhan pada umumnya adalah muallaf yang baru mengenal Islam. Oleh sebab itu, pola yang digunakan oleh Penyuluh Agama Islam dalam kegiatan *advokatif* di Daerah 3T berbeda dengan daerah lain, yaitu kerjasama dengan pihak Kepolisian, LIBAS dan KUA melalui bentuk kegiatan pelatihan, sosialisasi dan pembinaan-pembinaan lainnya. Tujuannya agar tindakan *advokatif* yang dilakukan dapat menekan atau mencegah terjadinya krisis moral, akhlak dan rasa nasionalisme

yang semakin hari semakin mengancam keutuhan NKRI.

**Gambar 8.** Skema Pola Komunikasi Penyuluh Agama Islam dalam Melaksanakan Fungsi *Advokatif*



## SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian, maka Pola Komunikasi Penyuluh Agama Islam dalam melaksanakan fungsi pokok penyuluhan kepada masyarakat di Daerah 3T Kecamatan Sajingan Besar, baik itu fungsi *Informatif*, *Edukatif*, *Konsultatif* dan *Advokatif* secara sistematis terjalin cenderung bersifat personal dan kelompok yang dialogis. Sifat sistematis tersebut, secara empirik dapat dilihat dari pola komunikasi yang digunakan oleh penyuluh di lapangan, yaitu Pola Roda, Pola Rantai, Pola Bintang dan Pola Lingkaran.

Faktor sosiologisnya adalah dikarenakan subjektivitas aktor komunikasi yang mempengaruhi proses penyuluhan, baik itu situasional, kepribadian dan sosial budaya masyarakat di daerah tertinggal, terluar dan terdepan. Oleh sebab itu, kecenderungan pola komunikasi yang berlangsung antara penyuluh dengan masyarakat atau masyarakat dengan masyarakat dalam proses penyuluhan lebih menekankan pada aspek sosial keagamaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adnan. (2015). *Model Pendidikan Agama Anak Usia Praskolah dalam Keluarga Melayu Sambas*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Basit, A. (2013). *Filsafat Dakwah*. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design; Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Metode Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Denzin, N. K. dan Y. S. L. (2009). *Handbook of Qualitative Research*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Komigi, I. (2015). *Evaluasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Di Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat (Studi Kasus Pada Suku Moi)*.
- Litlejohn, Stephen W., dan K. A. F. (2014). *Theories of Human Communication*. Trj. Muhammad Yusuf Hamdan. Jakarta: Salemba Humanika.

- Mujib, E. A. dan A. (2009). *Dasar-dasar Bimbingan dan Penyuluhan Islam*. Bandung: Sajjad Publishing House.
- Muridan. (2007). Islam dan Budaya Lokal: Kajian Makna Simbol dalam Perkawinan Adat Keraton. *Jurnal Studi Islam Dan Budaya*, 5(1).
- Noer Aly, H. (2007). *Potret Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Bengkulu dalam Islam di Bengkulu*. Bengkulu: Kantor Wilayah Departemen Agama Bengkulu.
- Sobur, A. (2014). *Ensiklopedia Komunikasi*. Bandung: Simbiosis.
- Soekanto, S. (2007). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Yin, R. K. (n.d.). *Metode Studi Kasus; Desain dan Metode*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.